

MAKALAH
MENGEVALUASI KEBIJAKAN PENGUKURAN

Dosen Pengampu:

Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.

Galuh Sandi, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh: Kelompok 6

1. Vina Nailatul Izza 2413031007

2. Nashita Shafiyah 2413031009

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak, seperti manajemen, investor, kreditur, dan pemerintah, dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi keuangan tersebut disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku. Salah satu unsur penting dalam penyusunan laporan keuangan adalah kebijakan pengukuran, karena kebijakan ini menentukan bagaimana suatu aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dinilai serta dicatat dalam satuan moneter.

Perbedaan kebijakan pengukuran yang digunakan oleh suatu entitas dapat menyebabkan perbedaan dalam penyajian laporan keuangan, meskipun transaksi ekonomi yang terjadi sama. Hal ini dapat memengaruhi tingkat relevansi, keandalan, dan daya banding informasi akuntansi. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pengukuran menjadi penting dalam teori akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan standar, tetapi juga mampu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan pengukuran dalam teori akuntansi?
2. Apa saja jenis kebijakan pengukuran yang digunakan dalam akuntansi?
3. Bagaimana kriteria evaluasi kebijakan pengukuran akuntansi?
4. Apa dampak kebijakan pengukuran terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan konsep kebijakan pengukuran dalam akuntansi.
2. Mengidentifikasi berbagai jenis kebijakan pengukuran.
3. Mengevaluasi kebijakan pengukuran berdasarkan kriteria tertentu.
4. Menganalisis dampak kebijakan pengukuran terhadap laporan keuangan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Kebijakan Pengukuran dalam Akuntansi

Kebijakan pengukuran dalam akuntansi merupakan seperangkat prinsip dan metode yang digunakan untuk menentukan nilai moneter dari unsur-unsur laporan keuangan. Melalui pengukuran, transaksi dan peristiwa ekonomi dapat dicatat dan disajikan secara kuantitatif sehingga mudah dipahami dan dianalisis oleh pengguna laporan keuangan.

Dalam teori akuntansi, kebijakan pengukuran tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis pencatatan, tetapi juga sebagai bagian dari kerangka konseptual pelaporan keuangan. Pemilihan metode pengukuran harus mempertimbangkan tujuan pelaporan keuangan serta kebutuhan informasi para pemangku kepentingan.

Selain itu, kebijakan pengukuran harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan disusun secara konsisten dan dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas. Konsistensi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap informasi akuntansi yang disajikan.

2.2 Jenis-Jenis Kebijakan Pengukuran Akuntansi

Dalam praktik akuntansi, terdapat beberapa jenis kebijakan pengukuran yang digunakan untuk menilai unsur laporan keuangan. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah biaya historis, yaitu pengukuran berdasarkan harga perolehan awal suatu aset atau liabilitas. Metode ini dinilai objektif dan mudah diterapkan.

Selain biaya historis, terdapat kebijakan pengukuran nilai wajar yang menilai aset dan liabilitas berdasarkan nilai pasar pada saat pelaporan. Nilai wajar dianggap lebih relevan karena mencerminkan kondisi ekonomi terkini, namun sering kali menghadapi kendala subjektivitas dalam penentuan nilainya.

Metode pengukuran lainnya meliputi nilai realisasi bersih dan nilai kini. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga pemilihan kebijakan pengukuran harus disesuaikan dengan karakteristik transaksi dan tujuan pelaporan keuangan yang ingin dicapai.

2.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan Pengukuran

Evaluasi kebijakan pengukuran dilakukan untuk menilai apakah metode yang digunakan telah menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Salah satu kriteria utama dalam evaluasi tersebut adalah relevansi, yaitu kemampuan informasi untuk memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.

Kriteria berikutnya adalah keandalan, yang menuntut agar informasi keuangan bebas dari kesalahan material dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal harus mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dari suatu entitas dan disajikan secara jujur.

Selain relevansi dan keandalan, daya banding dan keterpahaman juga menjadi kriteria penting dalam evaluasi kebijakan pengukuran. Kebijakan pengukuran yang baik harus memungkinkan pengguna membandingkan laporan keuangan antarperiode serta mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar akuntansi.

2.4 Dampak Kebijakan Pengukuran terhadap Laporan Keuangan

Pemilihan kebijakan pengukuran memiliki dampak langsung terhadap penyajian laporan keuangan, terutama pada nilai aset, liabilitas, dan laba yang dilaporkan. Perbedaan metode pengukuran dapat menghasilkan angka keuangan yang berbeda meskipun transaksi yang mendasarinya sama.

Dampak tersebut dapat memengaruhi penilaian kinerja dan posisi keuangan perusahaan oleh pengguna laporan keuangan, seperti investor dan kreditur. Oleh karena itu, kebijakan pengukuran dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan.

Dengan demikian, kebijakan pengukuran harus dipilih secara hati-hati dan diterapkan secara konsisten. Pengungkapan kebijakan pengukuran secara jelas juga diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dasar penilaian yang digunakan oleh perusahaan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Kebijakan pengukuran merupakan elemen fundamental dalam teori akuntansi yang berpengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan. Evaluasi kebijakan pengukuran diperlukan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Pemilihan kebijakan pengukuran yang tepat akan membantu menyajikan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara lebih wajar sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang akurat.

3.1. Saran

Disarankan agar entitas dan penyusun laporan keuangan lebih cermat dalam memilih kebijakan pengukuran yang sesuai dengan karakteristik transaksi dan kondisi ekonomi perusahaan. Selain itu, konsistensi dalam penerapan serta transparansi dalam pengungkapan kebijakan pengukuran perlu ditingkatkan agar laporan keuangan memiliki kredibilitas yang tinggi. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji penerapan kebijakan pengukuran secara empiris guna memperkuat keterkaitan antara teori akuntansi dan praktik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkaoui, A. R. (2012). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Suwardjono. (2017). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.